

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Perangkat Daerah. (2019). *Panduan Penggunaan SIPD*.
- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Bappenas. (2013). *Membangun Sistem DataBase MDGs Dan Program Pembangunan: Untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin*. [online] available at [https://www.bappenas.go.id/files/1013/8070/7100/Buku III Sistem Database MDGs dan Program Pembangunan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1013/8070/7100/Buku_III_Sistem_Database_MDGs_dan_Program_Pembangunan.pdf) accessed on oktober 2021
- Chakhar, S., & Saad, I. (2014). Incorporating stakeholders ' knowledge in group decision-making. *Journal of Decision Systems, February 2015*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/12460125.2014.865828>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches (4th Edition ed.)*. California: SagePublishing.
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dione, Frans, Faradina, Utami. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, No.(3)1. Hal.8. Publisher Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World (Vol. 4880)*. Princeton University Press.
- Hasibuan, M. S. P., & Hasibuan, H. M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- LAN-RI. (2007). *Modul 1 Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning)*. Jakarta: Depdagri & LAN-RI

- Lestarna, G. & Halim. (2018). *Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah:(Studi Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan aplikasi*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2016). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 222–236. Retrieved from <http://stialanbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/index>
- Nasution, Muhammad Irfan., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol (9)2. E-ISSN 2716-022X
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta : Penerbit Alex Media Komputindo
- Patarai, D. M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah:(Sebuah Pengantar)* (Vol. 1). A. EMIL MATTOTORANG.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). The Dorsey Press.
- Riyadi & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2).
- Rusliadi. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten*

*Takalar*. Unismuh Makassar.

- Sipahutar, C. (2018). Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara).
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus*, 11(2).
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Takamiya, S. (1972). Group decision-making in Japanese management. *International Studies of Management & Organization*, 2(2), 183–196.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- United Nations. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2005. *United Nations*, 59(October), 1–38.
- Wahab, Solichin Abdul.(2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksa
- Widodo, Joko. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi ProsesKebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.
- Winarno, P. M., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 117-123.
- Woolf, N. H., & Silver, C. (2018). *Qualitative Analysis Using Nvivo, The Five Level QDA Method*. In Routledge. New York and London: Routledge.

Wurara, C. N. dkk (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol (2) No.5 Tahun 2020.*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Saistem Informasi Pembangunan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2019). *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018).

Peraturan Presiden. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*